

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI  
KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2014  
( Suatu Studi Distrik Balingga)<sup>1</sup>**

**Oleh : Tetu Tabuni<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

*Partisipasi politik masyarakat merupakan bagian integral dari pemerintah agar pemerintah juga bisa memperhatikan atau mendukung aspirasi rakyat. Masyarakat distrik Balingga dalam melakukan kegiatan politik terlihat hanya ikut-ikutan, bahkan ada yang berpikir kegiatan seperti ini biasa saja dan tidak ada artinya, padahal keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik sangat mempengaruhi untuk pengambilan keputusannya oleh pemerintah.*

*Partisipasi politik masyarakat juga dapat dijadikan sebagai masukan yang diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat kabupaten Lanny Jaya distrik Balingga, agar bisa berkembang secara mandiri. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mandiri menurut beberapa pakar partisipasi politik masyarakat di dalam pembangunan dapat membutuhkan sebuah kemampuan masyarakat dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu hal yang fundamental dalam pembangunan masyarakat adalah peningkatan partisipasi demokratis. Dengan demikian partisipasi tidak hanya ikut-ikutan tetapi mengambil peranan terutama mengontrol lembaga-lembaga yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat di distrik Balingga.*

**Kata Kunci :** *Partisipasi Politik Masyarakat*

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah berpartisipasi dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Pemilihan umum (PEMILU) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah Negara kita. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk lima tahun kedepan.

Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, DPD kemudian DPRD Daerah Propinsi, dan DPR Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih Presiden, Gubernur dan Bupati/ Walikota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan

---

<sup>1</sup> Merupakan Skripsi Penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Program Studi Ilmu Politik

hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritisi kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945 melalui amandemen pertama hingga keempat pada tanggal, 1-11 Agustus tahun 2002, telah memberi peluang pemberian hak politik masyarakat untuk memilih presiden secara langsung, dimana sebelumnya presiden hanya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini (Jimly Asshiddiqie, 2003:5).

Partisipasi Politik adalah faktor yang menentukan apakah pemilihan umum atau pileg yang langsung berhasil atau tidak, semakin tinggi tingkat partisipasi dalam pemilu, maka tingkat keberhasilan pemilu atau pileg semakin tinggi (Huntington dan Nelson, 2003: 367)

Dalam analisis modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan banyak di pelajari terutama dalam hubungan dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik khususnya juga dalam hal pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. (Miriam Budiardjo, 2008 : 367).

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif merupakan wujud kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi, suatu partisipasi masyarakat juga merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi pasif dan aktif untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan di desa maupun dalam kelembagaan atau secara kebersamaan. Biasa prinsip bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif dan eksekutif adalah dari oleh dan untuk masyarakat kabupaten/kota distrik atau desa juga bagian dari otonomi masyarakat desa adalah demokrasi masyarakat sesungguhnya, otonomi tidak akan terwujud jika tidak ada demokrasi.

Partisipasi politik masyarakat merupakan bagian integral dari pemerintah agar pemerintah juga bisa memperhatikan atau mendukung aspirasi oleh rakyat atau masyarakat kabupaten Lanny Jaya distrik Balingga. Masyarakat distrik Balingga adalah terdiri dari 15 Desa namun dalam kegiatan politik masyarakat hanya ikut-ikutan dan juga berpikir bahwa kegiatan seperti ini biasa saja padahal masyarakat keikut sertaan dalam kegiatan politik sangat mempengaruhi untuk pengambilan keputusannya oleh pemerintah.

Partisipasi politik masyarakat juga sebagai masukan agar diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat kabupaten Lanny Jaya distrik Balingga, agar bisa berkembang secara mandiri. Kesiediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mandiri menurut beberapa pakar partisipasi politik masyarakat di dalam pembangunan dapat membutuhkan sebuah kemampuan masyarakat dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu hal yang fundamental dalam pembangunan masyarakat adalah peningkatan partisipasi demokratis. Dengan demikian partisipasi tidak hanya ikut-ikutan tetapi pengambil peranan terutama mengontrol lembaga-lembaga yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat distrik dan pendesaan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Partisipasi Politik**

Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan mobilisasi (Silvia Bolghernia, 1998:8)

Partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa (Huntington dan Nelson, 1990:9-10),

Memberikan suatu catatan partisipasi politik yang bersifat *mobilized* (dipaksa) juga termasuk kedalam kajian partisipasi politik. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bolgherina yaitu bahwa dalam melakukan partisipasi politik cara yang digunakan salah satunya bersifat paksaan. Huntington dan Nelson perbedaan partisipasi politik sukarela dan mobilisasi diarahkan, senada dengan dipaksa hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan. Intinya baik sukarela ataupun dipaksa warganegara tetap melakukan partisipasi politik. Sehingga Partisipasi politik bersumber pada faktor kebiasaan maka masyarakat harus berpartisipasi mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Huntington dan Nelson, membagi bentuk-bentuk partisipasi politik yaitu:

1. Kegiatan Pemilihan- yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
2. Lobby- yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
3. Kegiatan Organisasi- Yaitu partisipasi politik individu kedalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengabdian keputusan oleh pemerintah.
4. Contacting- yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
5. Tindakan Kekerasan- yaitu tidkan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk disini adalah huru-hara, pemperontakan politik.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi legal atau illegal sebab itu, penyuaipan, ancaman dan sejenisnya tiap bentuk partisipasi adalah masuk kedalam kajian ini.

Menurut Satropoestro, (1995: 11) mengatakan Partisipasi Politik adalah keikutsertaan peran atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Pengertian ini menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian, atau turut serta menjumpangkan tenaga dan pikiran ke dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan atau diri sendiri atau pribadi yang lebih daripada sekendar kegiatan fisik semata (artikel Dr. Arfin Sitio, 1998:13)

Secara umum, partisipasi politik dapat diartikan sebagai keterlibatan diri seseorang dalam suatu kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau suatu proses identifikasi diri seseorang untuk menjadi peserta dalam kegiatan bersama atau dalam situasi sosial tertentu.

Fungsi partisipasi politik menurut Robert Lane (dalam Rush et al., 2000:20) partisipasi politik memiliki empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu yaitu:

1. Fungsi *pertama* sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancarkan usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.
2. Fungsi *kedua* sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulang yang luas dan berasma pejabat-pejabat itu pula partisipasi politik seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik. Orang-orang yang demikian itu merasa puas bahwa partisipasi politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.
3. Fungsi *ketiga* sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus orang berpartisipasi dalam politik karena politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek bagi pejabat-pejabat. Terlebih lagi bagi seseorang terjun dalam bidang politik, seringkali partisipasi politik dijadikan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya.
4. Fungsi keempat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bahwa sandar dan kebutuhan psikologi tertentu, yakni bahwa keterlibatannya dalam bidang politik untuk

memenuhi kebutuhan alam bahwa sandar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, prasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan atas target yang telah dijadikan.

### **Konsep Masyarakat**

Menurut Soekanto masyarakat adalah orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan. Menurut Poewardaminta masyarakat adalah pergaulan hidup manusia atau sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan tertentu (dalam Paulus Hariyono, 2007:155).

Jacobus Ranjabar,( 2003:19), mengatakan, definisi para ahli tersebut berlainan tetapi pada dasarnya tetap sama yaitu masyarakat yang mencakup beberapa unsur yaitu, Pertama, manusia yang hidup bersama, Kedua bercampur untuk waktu yang lama, Ketiga, sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, Keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh objek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, pada suatu konteks khususnya yang alamiah (Moleong, 2007:6)

### **PEMBAHASAN**

#### **Pemilihan Legislatif di Kabupaten Lanny Jaya distrik Balingga**

Dalam pemilihan legislatif atau pileg tahun 2014 yang lalu di Kabupaten Lanny Jaya distrik Balingga di lakukan serentak pada tanggal 9 Agustus 2014 pemilihan secara serentak ini baru pertama kali di lakukan sejak bergulirnya era reformasi. Saat itu yang menjadi peserta pileg dalam hal ini adalah pemilihan legislatif.

Dari beberapa caleg diatas hasil yang dipublikasikan oleh KPUD Kabupaten Lanny Jaya adalah, Budi Wenda, SH,Andur Tabuni, Asam Wenda,S.sos dari 8 caleg diatas dianggap tidak dapat secara ambang batas maka suara yang lain hilan

Yang pemenang peserta partai politik di distrik balingga adalah

1. Andur Tabuni Partai Golkar
2. Asam Wenda Partai Demokrat
3. Budi Wenda Partai PKS

Inilah yang menjadi pemenang partai politik di distrik balingga Kabupaten Lanny Jaya. Sementara perolehan suara caleg yang saat itu menjadi lawan mereka seperti 8 caleg hanya memberoleh dibawah BPP maka suara lain dianggap hilan

Partisipasi politik masyarakat pada saat pemilihan legislatif tahun 2014 di Kabupaten Lanny Jaya jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kabupaten lanny yaya distrik Balingga adalah berjumlah 16,545 pemilih yang terdiri dari 9,800 pemilihan laki-laki, dan 7,740 pemilih perempuan.

Dari jumlah tersebut yang menggunakan hak pilihnya disaat hari pemilihan berjumlah 16,545 untuk melihat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2014 di Kabupaten Lanny Jaya distrik Balingga pada pemilihan legislatif distrik balingga tahun 2014 penulis akan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Ramalan (1974) partisipasi politik masyarakat mengenai pemilih.

#### **Kategori Pemilih Rasional. (*Rational Voter*)**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemilih ini dikatakan sebagai pemilihan yang memiliki orientasi rendah untuk faktor ideologinya. Selain mengenai pemilih lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau caleg dalam program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat. Dan juga salah satu pemilih ini adalah tidak begitu ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang.

Faktor seperti faham, asal-usul, nilai tradisional, budaya, masyarakat dipertimbangan juga, tetapi bukan hal signifikan. Hal yang terpenting bagi mengenai pemilihan ini adalah apa yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau seorang caleg dibandingkan faham dan nilai partai dan kontestan. Oleh karena itu ketiga partai politik atau caleg ingin menarik perhatian pemilihan, mereka harus mengedepankan solusi logis akan permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial-budaya dan para caleg mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab, tetapi juga pemilihan ini tidak akan segan-segan berahli dari sebuah partai atau caleg kepartai politik lain ketika mereka dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan

Seperti faktor pemilihan ini terdapat juga pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif di kabupaten Lanny Jaya distrik Balingga ini ditemukan ketika penulis mewawancarai dengan beberapa informan mengenai alasan mereka dalam pemilihan legislatif tertentu pada saat pemilihan caleg tahun 2014 lalu. Karena sebagian besar memperhitungkan apa yang keuntungan bagi dari mereka yang memilih caleg yang mereka sukai.

Menurut penulis hal itu dimungkinkan karena tingkat pendidikan para informan terlihat sudah cukup baik disamping itu pengalaman mereka dalam hal pemilihan umum sudah banyak sehingga dalam membuat keputusan sudah melakukan berbagai pertimbangan secara rasia.

### **Faktor Pemerintahan**

Pemerintah mempunyai andil yang cukup besar terkait dengan suksesnya penyelenggaraan pemilu dan korelasinya dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan

Ada beberapa aturan yang terkait dengan system kepemiluan yaitu:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara pemilihan Umum;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dari hasil wawancara yang ada masih banyak masyarakat kurang memahami tentang partisipasi politik dalam pemilihan, tetapi masyarakat tetap berpartisipasi kegiatan tersebut.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Distrik Balingga mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya termasuk pemilih yang rasional. Hal itu dimungkinkan karena masyarakat di wilayah ini tingkat pengetahuannya cukup baik akibat dari sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara sudah cukup baik.
2. pemilih kritis di Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya dapat dikatakan ada.
3. Pelaksanaa kegiatan pemilihan masyarakat distrik Balingga kabupaten Lanny Jaya sudah berjalan, namun sekarang nampaknya masih meninggalkan masalah seperti saling dendam antara pendukung dari masing-masing pihak terutama bagi pihak yang kalah.
4. Kurangnya kordinasih dari pemerintah mengenai pemilihan legislative peran pemerintah dalam hal ini pihak pemerintah distrik dan pemerintah desa belum memaksimalkan

### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian antara lain:

1. Perlu adanya pembenahan dari sisi peraturan perundangan terkait system pemilihan agar hak-hak pemilih dapat terjamin.
2. Pendidikan politik masih perlu terus dilakukan agar kedepan partisipasi politik masyarakat dapat lebih baik dan mendekati ideal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie Jimly, 2003, *Konsolidasi Naska*, Jakarta Indonesia Pustaka Utama.
- Ali Maertopo, 1974. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS
- Arbi, S 1985 *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta: CV . Rajawali.
- Budiarjo. Merriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedi Pustaka Utama.
- Budiardjo Miriam, 1945, *Demokrasai Di Indonesia*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Basrowi, Sundikin dan Suko Susilo, 2012, *Sosiologi Politik*. Bogor Ghalia Indonesia
- Choen dan Uphoff, 1977. *Rural Development Participation*. Consept New York
- Dasmal Dr. Prof, 2009, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Huntington dan Nelson, 1990, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta Rineka Cipta.
- Huntington dan Nelson, 1977, *Political Participation In Developing countries*
- Legowo, Tommi A, 2006. *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Good Governance dan Masa Depan Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Politik No 20
- McClosky. Herbart, 1972 *Political Partisipation* New York Company.
- Mubyarto T, 1995. *Politik Pembangunan* Yogyakarta. PT Tiara Wacana Yogya.
- Moleong, 2007, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Pustaka Utama, Jakarta. Pemungkas Sigit, 2009. *Perihal Pemilu*, JIP UGM, Yogyakarta.
- Paimin Napitupulu, 2004. *Peran dan Pertanggungjawaban DPR kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta*. Desertasi Alumni Bandung
- Ranjabar Jacobus, 2003, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Rush, Michael dan Althoff, Philip, 2000. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Granfido Persada.
- Surbakti Ramalan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama.
- Soerharno, 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. DIKTAT.
- Soelaeman M. Munandar 1987, *Ilmu Sosial Dasar*, Refrika Pertama, Bandung.
- Verba S dan Norman H. Nie, 1972 *Participation In Aamerica*, New York: Harper and Row.